

TRANSFORMATION OF THE ROLES OF SAUDI ARABIAN WOMEN POST-IMPLEMENTATION OF THE "SAUDI VISION 2030" IN THE PERSPECTIVE OF MODERNISM

TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN SAUDI ARABIA MODERN PASCA VISI SAUDI ARABIA 2030 DALAM PERSPEKTIF MODERNISME

Nahdhiyatus Sholihah^{1*}, Andi Khaeratul Ummah¹, Wildana Wargadinata¹, Haura Jannah²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

²Alqasimia University, UAE

*Corresponding author: nahdhiyadiya1998@gmail.com

Article history:

Received

December 2022

Revised

December 2023

Accepted

December 2023

Keywords:

**Arab Vision 2030;
modernism;
women; social
transformation**

Kata Kunci:

**Arab Vision 2030;
modernisme;
perempuan;
transformasi
sosial**

This is an open access
article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

The modernization of Saudi Arabia, manifested in the Arab Vision 2030 policy, has implications for various sectors of life, including the perceived modern transformation of Saudi women. Among the research on Arab Vision 2030, this article specifically focuses on elaborating the forms of transformation of Saudi women in various fields. This research uses a qualitative descriptive method that focuses on exploring literature related to women's activities and roles in the public domain after the implementation of Arab Vision 2030 and analyzing them from a modernist perspective. The results show that Arab Vision 2030 significantly impacts women's activities and roles in the public domain, especially in the socio-cultural field. This includes women's freedom to engage in public spaces, even without the presence of a legitimate companion (mahram), and without wearing a niqab or burqa. Women are also granted freedom in the fields of education, such as unrestricted choice of study programs and politics, including the permission to become politicians and hold ministerial positions, and in the economic field, with the freedom to choose careers and become corporate leaders.

ABSTRAK

Modernisasi Arab Saudi yang dimanifestasikan dalam kebijakan Arab Vision 2030 berimplikasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah transformasi perempuan Arab Saudi yang dinilai lebih modern. Di antara penelitian mengenai Arab Vision 2023, artikel ini secara khusus berfokus pada elaborasi bentuk-bentuk transformasi perempuan Arab Saudi dalam berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada penelusuran literatur terkait dengan aktivitas dan peran perempuan dalam ranah publik pasca penerapan Arab Vision 2030 dan menganalisisnya dari perspektif modernisme. Hasil penelitian menunjukkan Arab Vision 2030 memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas dan peran perempuan dalam ranah publik, khususnya di bidang sosial budaya. Di antaranya kebebasan perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, bahkan tanpa kehadiran pendamping sah (mahram) dan tanpa menggunakan cadar atau burqa. Perempuan juga diberikan kebebasan dalam bidang pendidikan seperti tidak terbatasnya pemilihan jurusan studi, bidang politik seperti diperbolehkan menjadi politikus dan menjabat menteri, serta dalam bidang ekonomi yaitu dengan kebebasan memilih karier dan menjadi pemimpin perusahaan.

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat berbagai kehidupan dari berabad-abad lamanya. Perkembangan dari waktu ke waktu telah terlihat jelas secara signifikan. Seseorang harus hidup mengikuti arus dari sesuatu yang telah lalu ke kehidupan yang akan datang. Dengan pikiran dan inovasi yang muncul dari berbagai aspek kehidupan akan terus membuat perubahan yang lebih baik. Perubahan dari yang lama ke sesuatu yang baru tersebut disebut modernitas.

Modernitas adalah sesuatu yang modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata modern adalah yang terbaru. Modern bisa diartikan sebagai tindakan, pandangan, atau perilaku sesuai dengan kondisi yang ada. Kebalikan dari kata "modern" adalah "tradisional", yaitu tindakan, pandangan, dan perilaku yang antusias terhadap nilai-nilai dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun (KBBI, 2020). Modernitas juga diartikan sebagai fase sejarah modern dan percampuran nilai-nilai budaya tertentu yang muncul di Eropa pada Abad Pertengahan dan selanjutnya menyebar luas ke seluruh dunia. Lebih lanjut, "modernitas" juga dapat merujuk pada pengetahuan subjektif, adanya kondisi dan pengaruh yang ada, seperti hubungan antar manusia terkait dengan keberadaan kapitalisme, atau terkait dengan sekularisasi dan kehidupan pasca industri, serta mencakup perubahan sikap (Hasanah et al., 2023).

Modernisasi merupakan bentuk perubahan dari tradisional ke modern. Sebagaimana dapat kita lihat pada upaya yang dilakukan tiap pemimpin negara yang selalu mencoba berinovasi menjadikan negaranya lebih modern. Seperti halnya Raja Salman, sebagai raja Arab ia mencetuskan Visi Saudi Arabia 2030 dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya, meningkatkan ekonomi dan mengurangi diskriminasi pada Perempuan yang telah bertahan bertahun-tahun lamanya di Arab.

Diskriminasi pada Perempuan di Saudi Arabia masih menjadi tradisi yang berakar dan masih begitu kental. Dengan banyaknya masalah-masalah yang ditemui atas nama perempuan, para ahli banyak melahirkan paradigma-paradigma tentang problematika perempuan (Abdullah et al., 2021). Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi sistem di kancah internasional dan telah menjadi domain Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini karena kesetaraan gender ialah representasi kondisional dari terwujudnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, negara, bahkan dunia (Dewi et al., 2020). Perempuan dalam hal berfikir selalu terus-menerus mengalami perkembangan yang signifikan, merujuk pada semakin banyaknya perempuan yang berkontribusi dalam ranah politik ataupun organisasi yang mewakili masyarakat (Putri Cahyaningsih et al., 2020).

Di era modern ini, perempuan berperan sama halnya dengan laki-laki, baik bidang sosial, maupun bidang politik. Modernisasi akan berubah sesuai dengan fakta bahwa ia berkembang dalam proses paralel yang saling terkait. Menurut Johannes Berger, modernisasi adalah pencapaian besar suatu masyarakat; suatu proses tertentu yang berupaya memodernisasi yang lain secara bersama-sama; suatu negara yang tidak menghalangi pengikutnya; proses modernisasi yang diarahkan pada tujuan bersama, atau dengan kata lain, model populer yang mencakup pertumbuhan ekonomi (pembangunan negara, partisipasi, redistribusi), mobilisasi dan perubahan internasional (Rosida, 2018).

Agenda Visi Saudi 2030 yang dicetuskan Raja Salman adalah "aset utama" untuk modernisasi sebuah negara. Salah satunya adalah membuka jalan perempuan untuk produktif, memainkan perannya, serta untuk mengembangkan bakat-bakat yang dikuasai. Seperti dikutip World Economic Forum's "Global Gender Gap Index 2010", Arab Saudi menempati urutan 129 dari 134 negara yang menuntut persamaan hak bagi perempuan, bahkan jika Saudi Vision 2030 terlaksana, diharapkan pemerintah Saudi Arabia akan ada gerakan untuk perubahan yang lebih baik, terutama pada isu-isu hak-hak perempuan dan gender (OHCHR 2017) Visi Arab Saudi 2030 merupakan aset penting bagi modernisasi suatu negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan kedudukan seorang Perempuan (Mufiedah et al., 2019).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan pustaka. Kualitatif karena diorientasikan pada pemaparan tentang bagaimana perempuan dengan adanya kebijakan Visi Saudi Arabia 2030 (Gunawan, 2022; Semiawan, 2010; Strauss & Corbin, 2003). Penelitian ini deskriptif karena mendeskripsikan hasil dari interpretasi peneliti (Yuliani, 2018). Sedangkan pustaka karena dilakukan dengan bantuan buku, jurnal dan literatur yang lain (Kuhlthau, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modernism, karena penelitian ini memaparkan bagaimana transformasi perempuan dalam teori modernisasi. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder (Budi, 2004; Munawaroh, 2013). Sumber data primer berupa literatur tentang perempuan Saudi Arabia dalam Visi Saudi Arabia. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku dan jurnal pendukung yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Teknik analisis data peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) peneliti melakukan reduksi data; 2) peneliti menganalisis sesuai dengan relevansinya terhadap tujuan penelitian; 3) peneliti menarik kesimpulan dari hasil intrepetasi serta melakukan induksi dengan tujuan mendapatkan temuan yang substantif dan formatif.

Dalam pembahasan transformasi perempuan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Perempuan di Saudi Arabia. Seperti M. Zulifan (2021) yang membahas reposisi identitas sosial perempuan Saudi pasca terbitnya visi Saudi 2030. Penelitian ini membahas perubahan sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi dan dampaknya bagi perempuan pasca diterbitkannya Visi Saudi 2030 oleh Muhammad Bin Salman (MBS). Kemudian Mega Hardiyanti dan Sri Yuniati (2021). Keduanya membahas penjaminan hak-hak perempuan dalam visi Saudi Arabia 2030. Dalam tulisannya mendeskripsikan bagaimana kehadiran Visi Arab Saudi 2030 memberikan hak-hak perempuan yang dilarang ataupun belum ada. Hal yang cukup mirip dapat dilihat pada tulisan Muhammad Ali dan Muhammad Syaroni Rofii Mr. (2021). Penelitiannya mengarah pada kebijakan militer Arab Saudi di bawah komando Mohammed bin Salman (MBS) menghadapi visi Saudi 2030. Keduanya memaparkan ambisi besar Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030 yang dicanangkan sejak 2016 untuk mendiversifikasi ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan politik negara. Dari ketiga penelitian yang telah dibahas diatas, membantu peneliti sebagai salah satu referensi yang relevan dengan pembahasan peneliti. Sedangkan posisi peneliti disini sebagai informan tambahan mengenai transformasi perempuan modern dalam Visi Saudi Arabia 2030.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk transformasi perempuan modern Saudi Arabia pasca Visi Saudi Arabia 2030. Dengan tujuan diatas, peneliti akan memaparkan bagaimana modernisasi perempuan yang bertransformasi dari sebelum hingga setelah adanya Visi Saudi Arabia 2030. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi dan penjelasan yang diharapkan dapat mudah dipahami.

PEMBAHASAN

Bentuk Transformasi Perempuan Modern Saudi Arabia Pasca Visi Saudi Arabia 2030

Dengan adanya visi Saudi Arabia 2030 terdapat beberapa perubahan yang signifikan tentang kedudukan seorang Perempuan di Arab. Kedudukan Perempuan yang terlihat adalah diberikannya kebebasan untuk unjuk diri dilingkungan sosial, dapat mengutarakan pikiran dengan bebas dan dapat bepergian dengan nyaman, yang hal demikian itu semula banyak Batasan bahkan merupakan sebuah larangan bagi Perempuan Arab. Kebebasan ini disambut dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik Arab Saudi. Hal ini merupakan dampak dari modernisasi yang telah membuat transformasi perempuan Saudi memiliki gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Meski perlahan perubahan tersebut nyata tapi tidak dapat dihindari perempuan Arab Saudi sebagai realitas yang harus dijalani (Erwhintiana & Kusumawati, 2021). Teori modernisasi

merupakan teori yang membahas tentang mekanisme perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Teori modernisasi berfokus pada mekanisme perubahan dari masyarakat pra-modern ke masyarakat modern, tidak hanya melalui proses pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui perubahan struktur sosial, budaya, dan politik (Hasanah et al., 2023). Berikut beberapa transformasi atau perubahan yang terjadi kepada Perempuan pasca visi Saudi Arabia 2030:

a. Bidang Sosial Budaya

Perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, burqa, dan niqab

Perempuan Saudi Arabia memiliki aturan dalam berpakaian. Pakaian yang harus dikenakan adalah pakaian abaya dan berhijab serta menggunakan cadar atau niqab. Perempuan tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali hanya terlihat mata dan telapak tangan. Peraturan dalam berpakaian ini adalah aturan kerajaan yang sesuai dengan hukum syariah. Berbeda sekali dengan di negara lain yang membebaskan rakyatnya baik laki-laki dan Perempuan dalam berpakaian. Terlepas dari aturan agama yang mengikat dari setiap individu. Dengan seiring berjalannya waktu, aturan tersebut dapat berubah dengan terjadinya modernisasi dengan ditandai adanya visi Saudi Arabia 2030.

Lahirnya visi Saudi merubah aturan tersebut dan membebaskan perempuan dalam berpakaian. Anehnya, kebijakan ini mendapat dukungan dari Sheikh Abdullah al-Mutlaq, seorang anggota Majelis Ulama Saudi, yang mengatakan bahwa wanita harus berpakaian sopan, tapi bukan berarti mereka harus memakai abaya (Zulifan, 2021). Dengan demikian pencabutan aturan dalam berpakaian merupakan bentuk modernisasi bagi Perempuan Arab. Perempuan yang sebelumnya terikat dengan aturan-aturan mutlak, kini perempuan dapat lebih bisa menunjukkan ekspresi diri dan mengutarakan pemikirannya dengan terbuka.

Diperbolehkan ke bioskop

Perempuan Saudi memiliki keterbatasan dalam bepergian atau keluar rumah. Meonton film di bioskop, konser music, ataupun mengunjungi stadion merupakan larangan bagi Perempuan Saudi. Oleh karenanya kebebasan yang dirasakan perempuan luar Arab merupakan kemewahan bagi Perempuan Arab, karena mereka telah hidup dengan keterbatasan gerak. Terjadinya modernisasi adalah harapan baru bagi para Perempuan Arab. Merasakan kemewahan dengan menonton film atau konser music tentu menjadi Impian mereka.

Pada reformasi kebijakan Putra Mahkota Mohammad bin Salman yang diterapkan MBS menyatakan pembukaan kembali bioskop, pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan, dan akses ke stadion. MBS meluncurkan praktik tersebut pada hari ulang tahun ke-87 kerajaan Arab Saudi (Yaumul Wathon), ketika ratusan wanita berbondong-bondong ke Stadion Internasional Raja Fahd Riyadh untuk konser dan pertunjukan opera untuk merayakan hari jadi kerajaan (Zulifan, 2021). Perubahan aturan yang diterapkan untuk Perempuan tersebut merupakan bentuk modernisasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, yang mana mereka dapat menikmati hiburan dengan bebas tanpa ada Batasan lagi, selain itu negara juga dapat mengambil manfaat dari semakin banyaknya penggunaan bioskop maupun stadion, maka semakin banyak juga mobilitas dan transaksi sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi.

Izin Perempuan Mengemudikan Kendaraan

Larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi didasari dengan alasan agama dan budaya. Di negara yang sangat konservatif ini, perempuan duduk dikursi kemudi dianggap tabu. Asumsi ini lahir karena adanya anggapan tidak masuk akal bahwa Perempuan merupakakan simbol kemaksiatan dan dosa. Adanya pemikiran bahwa wanita yang mengendarai mobil mudah melepas jilbabnya. Selain dua alasan tersebut, beberapa pria di Arab Saudi masih percaya bahwa mengizinkan wanita mengemudi mengurangi nilai-nilai tradisional seperti pemisahan gender. Apalagi ketika stigma sosial tersebut didasarkan pada perkataan seorang ilmuwan besar Saudi yang mengatakan bahwa wanita tidak cukup pintar untuk mengendarai mobil.

Larangan mengemudi kendaraan bagi perempuan dirilis melalui fatwa Dewan Ulama Senior Negara pada 7 November 1990 atau 20 Rabiul awal 1411. Setelah Sembilan tahun, fatwa yang sama dikeluarkan oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Arab Saudi (Jamjoom, 2013). Sepuluh tahun kemudian, fatwa ini masih mendukung eksistensi perempuan di Arab Saudi, dan pada tanggal 26 September 2017, Raja Salman bin Abd al-Aziz mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa perempuan berhak mengemudikan mobilnya sendiri yang efektif pada Juni 2018 (Ramadhan & Shofwan, 2019). Terobosan reformasi nasional di bidang sosial ini kaum perempuan juga telah diizinkan untuk melakukan perjalanan tanpa harus didampingi oleh wali. Dicabutnya larangan mengemudi bagi Perempuan merupakan bentuk kesetaraan dan salah satu kebebasan Perempuan sebagai upaya modernisasi dari Kerajaan Arab.

b. Bidang pendidikan

Pemerintah Saudi telah melakukan pengembangan dan memperbaiki sistem pendidikan selama lima tahun terakhir, kenyataannya diskriminasi posisi gender masih menunjukkan eksistensinya. Sistem pendidikan di Arab Saudi sangat terkait dengan ajaran Islam sehingga kurikulumnya juga berbasis agama. Pasal 13 Undang-Undang Pokok Pemerintahan Negara menyerukan bahwa tujuan pendidikan ini adalah menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Sesuai dengan hukum tertulis, nilai-nilai agama ditanamkan sejak dini. Atas dasar itu, lembaga pendidikan di Arab Saudi juga membedakan perempuan dan laki-laki dengan berbagai alasan, termasuk saat memilih jurusan. Program studi lembaga pendidikan di Arab Saudi ditata sedemikian rupa sehingga terdapat peran antara laki-laki dan perempuan. Menurut syariat Islam, laki-laki memiliki peran di ruang publik, yaitu pekerjaan dan tanggung jawab perlindungan perempuan. Di sisi lain, bidang kegiatan perempuan terbatas pada wilayah internasional (rumah tangga) (Alwedini, 2016).

Pemerintahan Saudi membatasi Perempuan dalam bidang Pendidikan. Di Tingkat universitas Perempuan tidak diberi kebebasan dalam memilih jurusan yang ditempuh, pasalnya banyak jurusan yang hanya diperuntukkan kaum laki-laki. Jurusan yang ditawarkan kepada laki-laki adalah jurusan yang memasukkan unsur maskulinitas, seperti sains dan teknologi. Gelar yang ditujukan untuk perempuan meliputi humaniora, pendidikan guru, sastra dan kesehatan. Hal ini memberi dampak pada Perempuan dalam memilih karirnya.

Kementerian Pendidikan Arab Saudi telah berhasil mencapai tujuan Visi Kerajaan 2030 di bidang pembangunan manusia dengan dukungan penuh dari kedua Wali Masjidil Haram (Raja Salman) dan Putra Mahkota dalam berbagai program pendidikan (Riyadh, 2021). Tujuannya visi tahun 2030 adalah menciptakan ruang gerak atau kedudukan perempuan guna dapat mengembangkan kreativitasnya dan bagaimana perempuan dapat mewujudkan keterampilannya, serta memberikan kebebasan perempuan dalam memilih pendidikan sesuai dengan bakat yang dimilikinya (FAjar & Rasyidah, 2021). Dengan demikian adanya visi Saudi Arabia 2030 pembatasan dalam bidang Pendidikan dimodernisasi sebagai upaya mencabut pembeda antara laki-laki

dan Perempuan sehingga Perempuan dapat bebas memilih karir masa depan yang diminati.

c. Bidang politik

Perempuan di Saudi Arabia selama ini hidup dalam keterbatasan gerak. Mereka tidak bisa melibatkan diri dalam sektor publik atau hanya sekadar beraktivitas di luar rumah (Saikuddin & Amrullah, 2023). Siapa pun yang melanggar aturan ini akan selalu menghadapi penegakan hukum setempat. Visi Arab Saudi 2030 telah banyak menghasilkan terobosan dalam kancah politik bagi perempuan. Reformasi di Arab Saudi telah memungkinkan perempuan untuk menjadi diplomat dan bergabung dengan militer. Kementerian Luar Negeri (Wizara Khalijiya) membebaskan 113 diplomat perempuan. Salah satu perempuan yang menjadi diplomat adalah Manal Radwan yang menjabat sebagai koordinator politik dan sekretaris delegasi Saudi di markas besar PBB di New York. Kandidat diplomat lainnya adalah Hala Waleed al-Jafail, konsul jenderal Saudi di pulau St. Lucia di Karibia timur. Terkait kebijakan militer, Direktorat Jenderal Keamanan Arab Saudi telah menerima permintaan delegasi tentara wanita untuk operasi militer di Mekkah, Madinah, Qassim, Asir, dll. Pada tahun 2021, pemerintah Saudi mulai mendaftarkan wanita Saudi sebagai tentara kerajaan. Perempuan juga ditempatkan sebagai penjaga keamanan di kompleks Masjidil Haram. Menariknya, keputusan ini mendapat dukungan dari Dewan Syura Arab Saudi (Zulifan, 2021).

Dalam kerangka Kerajaan, Perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pada Desember 2015, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden daerah di tingkat nasional. Perempuan juga diperbolehkan bekerja pada posisi strategis di Badan Perencanaan dan Persetujuan Kebijakan Strategis. Sebelumnya, Noor al-Fayez, juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi. Saudi juga menunjuk Putri Kerajaan Rima bin Bandar sebagai duta besar untuk Amerika Serikat (Washington, n.d.). Rima adalah wanita Saudi pertama yang memegang peran strategis ini. Saat ini, wanita Saudi memegang kedudukan tinggi seperti duta besar, direktur, kepala lembaga swasta dan juru bicara pemerintah. Suara Anda akan didengar di seluruh dunia. Pada Februari 2021, wanita Arab Saudi itu menerima pangkat dan gelar Panglima Tentara Kerajaan. Posisi yang ditugaskan adalah Sersan di Angkatan Darat Arab Saudi, Angkatan Pertahanan Udara Kerajaan Saudi, Angkatan Laut Kerajaan Saudi, Angkatan Rudal Strategis Kerajaan Saudi dan Layanan Medis Bersenjata.

Dalam bidang politik ini, upaya Raja Salman memodernisasi sebuah negara dengan menempatkan Perempuan sebagai bagian dari politik sangat berdampak bagi beberapa perempuan. Alhasil Perempuan juga dapat menunjukkan kemampuannya dan memiliki kontribusi besar dalam memajukan sebuah negara atau Kerajaan. Beberapa Perempuan selain yang telah disebutkan diatas yang telah unjuk diri di bidang politik diantaranya yaitu:

1. Tamadur binti Youssef al-Rahmah

Raja Salman sendiri awalnya menunjuk Tamadur binti Youssef al-Rahmah, perempuan yang juga ditugaskan di Kementerian Sosial dan Keluarga, sebagai wakil menteri tenaga kerja. Tamader bint Yusef Al-Rammah diangkat menjadi Wakil Menteri Perburuhan & Pembangunan Sosial Arab Saudi dalam Februari 2018. Tamader pula menjabat menjadi ketua otoritas sosial & keluarga. Mengutip Arab News, Tamader Al-Rammah meraih gelar sarjana di bidang radiologi dari Universitas King Saud pada tahun 1995, gelar master di bidang radiologi diagnostik dari University of Wales, Bangor pada tahun 2003 dan kemudian gelar PhD di

bidang radiologi dan teknik medis 2007 di Universitas Manchester. Tamader adalah Associate Professor Radiologi di King Saud University dan Research Associate di Departemen Fisika Medis rumah sakit dan di Pusat Penelitian Spesialis King Faisal sebelum mengambil posisi di parlemen. Pada 2016 ia menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia Saudi dan Masyarakat Kanker Payudara Zahra di Riyadh (Faiza, 2022).

2. Hanan al-Ahmadi

Hanan al-Ahmadi adalah wanita pertama yang ditunjuk oleh Raja Salman sebagai pembicara dan anggota pengganti Dewan Syura. Badan yang paling berpengaruh adalah Dewan Syura atau Majelis Permusyawaratan Saudi, badan penasehat resmi Arab Saudi.

Mengutip Al-Arabiya, perempuan bernama lengkap Hanan binti Abdulraheem al-Ahmadi, Profesor Manajemen Kesehatan di Institut Administrasi Publik Saudi, Anggota Dewan Forum Ekonomi Riyadh, adalah redaktornya. Anggota Board of Journal of Public Administration dan Anggota Board of Management Association Saudi. Hanan menerima gelar sarjana ekonomi dari Universitas King Saud, gelar master dalam administrasi perawatan kesehatan dari Tulane University School, dan gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Pittsburgh.

3. Haifa al-Hababi

Haifa al-Hababi adalah politisi pertama yang mendaftar untuk pemilu 2015 di Arab Saudi, menurut India.com. Sosok berani antara perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan di sebuah negara yang menjadi perhatian public (Faiza, 2022).

d. Bidang ekonomi

Kesulitan mobilitas publik bagi perempuan juga mempengaruhi prospek perekonomian. Beberapa batasan khusus berlaku bagi perempuan yang ingin mengejar karir atau memulai bisnis sendiri. Pembatasan ini didasarkan pada hukum Syariah Islam Arab Saudi. Kehidupan industri dan perkantoran tidak berkembang pesat sampai minyak ditemukan di Arab Saudi. Oleh karena itu, perempuan Saudi menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai ibu rumah tangga. Namun, beberapa perubahan terjadi setelah minyak ditemukan di Arab Saudi pada tahun 1960an. Perempuan dapat belajar dan menerima pelatihan sementara laki-laki bekerja di pemerintahan atau industri lain seperti proyek eksplorasi minyak. Untuk memaksimalkan kemakmuran negara, pemerintah Saudi telah mengizinkan perempuan untuk mengejar karir sejak tahun 1970an. Namun, demi memenuhi norma Islam, perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan bekerja di tempat yang sama. Diskriminasi berdasarkan gender sekali lagi menunjukkan peranannya dalam kehidupan kerja dan perekonomian negara. Hal ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa proporsi pekerja perempuan di Arab Saudi masih rendah. Hingga tahun 2011, keputusan kerajaan mengizinkan perempuan untuk memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Dalam waktu tiga tahun, sekitar 500.000 pekerjaan diciptakan untuk perempuan, sehingga meningkatkan peran perempuan Saudi dalam angkatan kerja (Alhussein, 2014).

Visi Saudi Arabia, datang dengan mengizinkan perempuan untuk melakukan pekerjaan dan bisnis sesuai keinginannya. Perempuan boleh bekerja di luar rumah selama tidak dilarang. Langkah ini merupakan tonggak kebebasan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak sosialnya di masyarakat. Dulu perempuan hanya diperbolehkan bekerja di toko linen dan toko kosmetik, namun kini pemerintah Saudi melatih mereka menjadi pramugari atau pengawas lalu lintas udara. Saat ini ada 26 wanita Arab Saudi yang bekerja sebagai pengawas lalu lintas udara di bandara Arab Saudi. Perempuan memiliki hak untuk berbisnis dan memiliki perusahaan sendiri. Di

masa lalu, wanita di Arab Saudi harus meminta izin mahram (suami atau saudara laki-laki) mereka jika ingin memulai bisnis sendiri. Keputusan ini merupakan turunan dari kebijakan Visi 2030 Mohammad bin Salman, yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak warga negara dalam pembangunan ekonomi (Zulifan, 2021). Perempuan saat ini menjadi motor penggerak dalam mengejar sarana ekonomi alternatif di kerajaan. Dalam dekade terakhir, jumlah pengusaha dan CEO perempuan telah tumbuh secara eksponensial (Oktaviani & Maharani, 2021).

Dari semua pembahasan diatas, dapat kita pahami bahwa adanya kebijakan pro kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan kemudian memunculkan program Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Mohammad bin Salman. Kebijakan inilah yang dikenal dunia karena hal-hal yang membatasi perempuan, satu per satu dihilangkan (Dewi et al., 2020). Visi Saudi Arabia 2030, merubah kedudukan perempuan dan memberi ruang gerak lebih luas. Dengan adanya visi tersebut, perempuan Saudi berkontribusi sebagai duta besar, CEO, kepala perusahaan swasta, juru bicara pemerintah dan posisi senior lainnya. Suara mereka saat ini terdengar jelas di seluruh dunia.

Dengan pemaparan transformasi yang terjadi pada Perempuan Saudi tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan-perubahan yang terjadi kepada Perempuan sebagai bagian dari visi Saudi Arabia 2030 dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera sesuai dengan apa yang dimaksud modernisasi dalam ilmu-ilmu sosial, yang mana modernisasi mengacu pada keadaan perubahan dari zaman yang belum maju atau berkembang ke arah yang lebih baik, guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, maju, dan modern. Modernisasi tidak hanya mengacu pada hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti cara berpikir dan berperilaku.

KESIMPULAN

Modernisasi merupakan teori yang membahas tentang sitematika perubahan yang terjadi kepada masyarakat dari tradisional ke modern. Teori modernisasi berfokus pada mekanisme perubahan masyarakat pramodern menjadi masyarakat modern melalui perubahan struktur sosial, budaya dan politik serta melalui proses pertumbuhan ekonomi. Modernisasi banyak dilakukan oleh berbagai pemimpin negara. Salah satu yang melakukan peran besar adalah Raja Salman untuk Saudi Arabia.

Visi Saudi Arabia 2030 merupakan usaha Raja Salman untuk melakukan modernisasi terhadap keadaan di Saudi Arabia. Reformasi besar diadakan dengan tujuan untuk memodernisasi Arab Saudi menjadi lebih baik dan lebih maju. Dampak dari dibentuknya Visi Saudi Arabia 2030 memiliki peran penting atas kedudukan perempuan di Saudi Arabia, yaitu perempuan dalam modernisasi Visi Saudi Arabia 2030 berdampak pada transformasi perempuan dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang sosial budaya, perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, burqa, atau niqab. Diperbolehkan ke bioskop ataupun konser music maupun ke stadion sepak bola. Perempuan juga mendapatkan izin untuk mengemudikan kendaraan. Dalam bidang pendidikan, perempuan dibebaskan dalam memilih jurusan di Universitas, yang mana sebelumnya jurusan di perguruan tinggi untuk Perempuan telah ditentukan. Sedangkan di bidang politik, perempuan dapat menjadi anggota politik negara, seperti Menteri atau dewan. Kemudian di bidang ekonomi, perempuan dapat memiliki karir sesuai dengan minat dan bakatnya, bahkan perempuan bisa memimpin suatu kelompok pekerja atau pemimpin sebuah Perusahaan.

Penelitian ini dirasa cukup baik oleh peneliti, sebagaimana dalam penelitian ini menjabarkan bagaimana perubahan yang terjadi pada Perempuan di era modern atas usaha modernisasi Raja Salman melalui reformasi Visi Saudi Arabia 2030. Namun, peneliti juga sangat menyadari banyak celah atau kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat mengisi celah seperti apa yang menjadi dasar utama Raja Salman melakukan reformasi besar atau semacamnya. Peneliti disini juga

berharap tulisan ini dapat berkontribusi dalam kajian tentang modernisasi ataupun visi Saudi Arabia yang pokok pembahasannya Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., Al-Amin, S., & Tangerang, K. (2021). Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka. *Stitalamin.Ac.Id*, 4(01), 2021. <http://stitalamin.ac.id/jurnal/index.php/alaman/article/view/87>
- Alhoussein, E. (2014). Triangle of change: The situation of women in Saudi Arabia. *The Norwegian Peacebuilding Resource Centre*, July, 1–4.
- Alwedini, J. A. (2016). Gender and Subject Choice in Higher Education in Saudi Arabia. *University of York*, May, 191.
- Budi, H. (2004). *Metodologi Penelitian Praktis*. LPPM YPPI.
- Dewi, N. R., Fikri, A. I., & Febriani, A. (2020). *Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi : Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman*. 6(1), 32–44.
- Erwhintiana, I., & Kusumawati, A. A. (2021). Refleksi Perempuan Arab Modern dalam Film Barakah Yuqobil Barakah. *Lingua*, 18(2), 290–302. <https://doi.org/10.30957/lingua.v18i2.720>.Refleksi
- Faiza, A. N. (2022). *Pejabat Perempuan Arab Saudi, Bukti Nyata Visi 2030*.
- FAjar, N., & Rasyidah. (2021). Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Saudi Era Raja Salman. *Takammul*, 10, 47–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v10i1.12600>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hasanah, M., Thayyibah, A., & Khairi, M. F. (2023). Hakikat Modern, Modernitas Dan Modernisasi Serta Sejarah Modernisasi Di Dunia Barat. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 309–318. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Jamjoom, M. (2013). No Title. *CNN World*.
- KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring*. Kemendikbud.
- Kuhlthau, C. C. (2002). *Teaching the library research process*. Rowman & Littlefield.
- Mufiedah, A. I., Harini, S., & Haqqi, H. (2019). Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Arab Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019. *Society*, 2(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Munawaroh. (2013). *Panduan Memahami Metode Penelitian*. Inti Media.
- Oktaviani, Z., & Maharani, E. (2021). Visi 2030 Buat Karier Wanita Saudi Alami Peningkatan. *Republika.Co.Id*.
- Putri Cahyaningsih, I., Widya Aprilia Elsani, N., Ilma Santi, A., & Jariyah dan Fadillah Ahmad Nur, A. (2020). *Peran Kepemimpinan Wanita Di Era Modern*. 5(1), 2527–3175.
- Ramadhan, R. B., & Shofwan, I. (2019). *Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif Maqashid As-syari'ah*. 3(1), 467–481.
- Riyadh, A. (2021, April). Visi 2030 adalah Sebuah Realita yang Bertujuan untuk Mencapai Pembangunan Manusia, Peran Serta dalam Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan untuk Semua. *Atdikbud Riyadh*.
- Rosida, A. (2018). *WACANA MODERNISASI DALAM TANTANGAN PERADABAN , PERAN*

PEREMPUAN SEBAGAI. 3(1), 81-96.

Saikuddin, A., & Amrullah, A. K. (2023). the Dynamics of Gender Equality and New Directions for the Role of Saudi Women. *Jurnal CMES*, 16(1), 51. <https://doi.org/10.20961/cmcs.16.1.64149>

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Warsito, A., & Wulandari, S. (2022). *KONSEP PEMERINTAHAN ARAB SAUDI DAN KEBIJAKAN VISI 2030*. 2(3), 53-54.

Washington, D. (n.d.). *Princess Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud*. The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. Retrieved December 20, 2023, from <https://www.saudiembassy.net/ambassador>

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.

Zulifan, M. (2021). *Reposisi Identitas Sosial Perempuan Saudi Pasca Terbitnya Visi Saudi 2030*. 18(2), 111-122.